

PERPUSTAKAAN NAGARI BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG DAN NAGARI LAWANG KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

Elva Rahmah¹, Desriyeni² & Novia Juita³

¹Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi FBS Universitas Negeri Padang

²Program Studi Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang

³Program Studi Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang (25132), Indonesia

Email: elva@fbs.unp.ac.id

Submitted: 2020-05-06

Accepted: 2020-06-01

DOI: 10.24036/abdi-humaniora.v1i2.108556

Revised: 2020-05-31

Published: 2020-06-01

URL: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/abdi-humaniora/article/view/108556>

Abstract

The purpose of the Community Partnership Program is to empower village libraries based on social inclusion so that they can contribute to village development and community empowerment. The library as a social sub-system in society should be a social inclusion institution, anyone can take advantage of library services. To achieve the objectives of the activity, several approaches were carried out including (1) the Participatory Rural Appraisal (PRA) model, (2) the Participatory Technology model, (3) the Community Development model, (4) persuasive namely the approach that was appealing and support without coercion for the community to play an active role in this activity and; (5) educative approach to socialization, training, and assistance as a means of transfer of knowledge and education for community empowerment. The method offered to solve the problem is to carry out socialization, comprehensive training in the management of village libraries based on social inclusion. Through this program, concepts and strategies for developing and empowering village libraries based on social inclusion have been conveyed to village managers, village library managers, and the community. Experience in developing community engagement activities for community empowerment through village libraries in Agam Regency. Participants can understand and commit to following up on the results of the discussion by first preparing a work plan. Communities who receive extension activities can also understand that the Nagari library is not only used as a means to borrow and read books. The village library can be utilized by the community for various activities that can be developed to improve the skills of the village community.

Keywords: *village library, social inclusion, library empowerment*

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti dilakukan pemerintah sebagai program pembangunan sumber daya

manusia. Untuk itu perlu kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk dapat melakukan program pemberdayaan. Dalam arti masyarakat harus memiliki pengetahuan, informasi dan keterampilan yang memadai. Sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa adalah perpustakaan desa.

Perpustakaan desa merupakan aset masyarakat yang sangat strategis dalam memajukan kecerdasan masyarakat melalui perannya dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis menuju masyarakat modern. Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan telah menyebutkan bahwa perpustakaan desa merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang menjadi kewajiban pemerintah desa (Indonesia & Nasional, 2010). Di pasal 48 sampai pasal 51 UU yang sama, pemerintah bersama masyarakat dan dunia pendidikan memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya budaya membaca masyarakat. Disisi lain masyarakat di desa yang sebagian besar bertani dan para pengrajin membutuhkan buku-buku teknologi tepat guna dan ilmu-ilmu terapan yang dapat meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan fenomena yang dilihat dilapangan perpustakaan desa hanya terdiri dari tumpukan buku yang tidak terkelola dan dimanfaatkan masyarakat. Salah satu program yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Melalui kegiatan pemberdayaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial diharapkan mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui literasi. Perpustakaan desa tidak hanya berisi buku-buku tetapi dapat menjadi tempat belajar, berlatih, berbagi dan menjadi pusat aktifitas masyarakat desa.

Pendekatan inklusi sosial di harapkan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan memperoleh kesempatan yang sama dan mengajak untuk bertindak inklusi dalam kehidupan sehari-hari. Inklusi sosial dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mengambil keuntungan dari peluang pembangunan global. Pendekatan inklusi sosial mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara.

Inklusi merupakan proses pembelajaran terus-menerus di mana ruang pembelajaran adalah masyarakat itu sendiri dan instrumen pembelajaran adalah aturan, praktik, tradisi dan budaya yang terbuka untuk digunakan dan diadaptasi. Inklusi sosial digunakan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka.

Merujuk pada Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab I Pasal 3 menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Semua itu merupakan modal untuk membangun desa inklusi. Inklusi sosial berlangsung pada arena penataan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pembuatan peraturan.

Desa di Sumatera Barat dinamakan Nagari. Nagari adalah lembaga pemerintahan dengan wilayah hukum yang berada pada posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari dan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh sekretaris nagari, beberapa pegawai negeri sipil yang jumlahnya tergantung kebutuhan pemerintahan nagari. Setiap nagari di seluruh wilayah Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat strategis karena menyatu dengan masyarakat dalam kehidupan nagari yang harmonis,

selaras, dan seimbang. Nagari terdiri dari jorong-jorong yang dipimpin oleh kepala jorong. Masyarakat nagari yang terdiri dari berbagai jorong hidup dengan nilai-nilai, norma, budaya, adat-istiadat, kekerabatan, kearifan lokal dan nuansa religius serta keramahan terhadap lingkungan.

Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilengkapi, difasilitasi, dan didukung dengan pembentukan lembaga-lembaga layanan sosial dan layanan publik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu lembaga itu adalah perpustakaan nagari. Perpustakaan Nagari merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang dikelola oleh nagari yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat nagari. Sebagian besar nagari di Sumatera Barat memiliki perpustakaan nagari tidak terkecuali nagari-nagari yang berada di Kabupaten Agam. Sebagian besar perpustakaan nagari yang ada belum diberdayakan secara optimal oleh masyarakat dan sebagian belum terkelola dengan baik.

Nagari Tigo Koto Silungkang Palembayan berjarak sekitar 138 KM dari Kota Padang dengan waktu tempuh sekitar tiga setengah jam jalan darat menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Nagari Lawang berjarak sekitar 118 KM dari Kota Padang dengan waktu tempuh sekitar tiga jam jalan darat menggunakan kendaraan bermotor/mobil. Nagari Tigo Koto Silungkang Palembayan memiliki jumlah penduduk 6,884 jiwa. Nagari ini terdiri dari empat jorong yaitu Jorong Tantaman, Jorong Silungkang, Jorong Gumarang 1 dan Jorong Gumarang 2. Nagari Lawang memiliki jumlah penduduk 3,198 jiwa yang berada di enam jorong yaitu Jorong Andaleh, Jorong Surau Lubuk, Jorong Saribulan, Jorong Cubadak Lilin, Jorong Sungai Buluh dan Jorong Taruyan.

Penggunaan lahan di kedua nagari ini didominasi areal pertanian, perkebunan, hutan, area perumahan, sarana prasarana dan pekarangan. Faktor pendukung perekonomian nagari ini secara umum dikelompokkan menjadi tiga yaitu faktor alam, faktor manusia dan faktor lingkungan sosial. Komoditi pertanian yang utama adalah padi, sayur-sayuran dan tebu.

Berdasarkan potensi yang dimiliki Nagari Tigo Koto Silungkang Palembayan dan Nagari Lawang Tim Pengusul PKM perlu untuk mengembangkan perpustakaan nagari yang berada di kedua nagari ini. Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi mitra dalam rangka diskusi dengan wali nagari, kepala jorong, dan pengelola perpustakaan nagari ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan perpustakaan yang terkait erat dengan pengembangan literasi di masyarakat nagari, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Matur, Kabupaten Agam di antaranya.

1. Perpustakaan nagari sudah terbentuk tetapi pengelolaan, pembinaan, dan pemberdayaan perpustakaan serta pengembangan belum ada. Hal ini dapat terlihat dari minimnya bahan bacaan dan belum dikelola dengan baik.
2. Pengelola perpustakaan nagari belum memiliki pengetahuan bagaimana mengelola perpustakaan nagari menurut suatu sistem yang baik, benar dan bersinergi.
3. Fasilitas perpustakaan nagari sebagai pendukung penyelenggaraan masih terbatas.
4. Kebiasaan dan budaya baca masyarakat masih perlu ditingkatkan.

5. Kebutuhan terhadap buku belum hal yang sangat utama bagi sebagian masyarakat nagari.
6. Masyarakat dalam kegiatan bertani dan industri rumah tangga masih secara tradisional belum memanfaatkan teknologi tepat guna.

Berdasarkan analisis situasi di atas, Tim Pengusul Program PKM yang terdiri dari tiga orang dosen dengan dua bidang keilmuan yang saling mendukung yaitu dua orang berlatarbelakang Perpustakaan dan Ilmu Informasi dan, satu orang berlatarbelakang Ilmu Bahasa Indonesia. Tim pengusul PKM Bidang Perpustakaan dan Ilmu Informasi memberikan materi tentang pengelolaan perpustakaan nagari dan melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pemberdayaan perpustakaan nagari serta pengembangannya dengan melibatkan semua unsur, para pelaku dan pemangku kepentingan di nagari. Tim pengusul PKM Bidang Ilmu Bahasa Indonesia memberikan materi tentang meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan gerakan literasi, karena itu perlu diupayakan akses ke sumber bacaan harus tersedia. Masyarakat harus didorong atau dimotivasi untuk terlibat dalam mendirikan, mengelola, dan memanfaatkan perpustakaan nagari dengan maksimal.

Literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis atau lebih dikenal dengan melek huruf. Literasi atau keberaksaraan dapat diartikan melek teknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik (Naibaho, 2007:3). Literasi informasi merupakan kemampuan dialog individu dalam masyarakat informasi. Literasi informasi dibutuhkan masyarakat untuk turut serta aktif dalam masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang dalam tata kehidupannya, informasi, dan pengetahuan berperan penting dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam kegiatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dari setiap kecamatan, hanya ada beberapa yang menyediakan tempat membaca. Sementara, hal tersebut sangat berpengaruh untuk menarik masyarakat membudayakan gerakan membaca dan menulis (budaya literasi).

Berdasarkan fakta saat ini, budaya literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Menurut UNESCO yang merilis survei terhadap minat baca di 61 negara tahun 2011, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen atau menempati peringkat kedua terendah dari negara yang disurvei. Artinya, hanya ada satu orang dari 1000 penduduk yang mau membaca buku secara serius. Rasio ini membuktikan bahwa diantara 250 juta penduduk Indonesia, hanya 250.000 yang mempunyai minat baca. Fakta tersebut didukung oleh survei tiga tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai minat membaca dan menonton anak-anak Indonesia, yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2012. Berdasarkan hasil survei, hanya 17,66% anak-anak Indonesia yang memiliki minat baca. Sementara, yang memiliki minat menonton mencapai 91,67% (Republika, 2015).

Menurut Sutarno NS, (2008:1) bahwa perpustakaan yang ada dan berkembang sekarang sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya. Perlu dipahami bahwa keberadaan perpustakaan nagari di tengah-tengah masyarakat harus sesuai dengan latar belakang profesi dari masyarakat tersebut dan juga perpustakaan memiliki tujuan sebagai lembaga penyedia informasi bagi penggunanya, yaitu seluruh masyarakat yang berada di sekitar

perpustakaan tanpa memandang perbedaan ras, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain.

Menumbuhkan budaya informasi menjadi tugas yang penuh tantangan ketika harus diterapkan ke masyarakat yang masih belum sepenuhnya menganggap bahwa informasi itu penting (Lakmi, 2015:7). Tugas itu sudah dilakukan oleh lembaga informasi seperti perpustakaan tetapi dampaknya belum sepenuhnya tercapai. Melalui pendekatan sistem sosial atau pendekatan kemanusiaan diharapkan perpustakaan desa mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menemukan solusi dalam kehidupan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidupnya (Prasetyawan, 2015:34).

Melalui hasil bacaan yang dibaca masyarakat dapat memperbaiki cara bertani, penggunaan teknologi dalam pertanian, membuat kerajinan tangan, memasarkan hasil pertanian dan kerajinan tangan sehingga dapat menampah pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Bahkan dapat dijadikan bekal untuk membuka lapangan kerja sesuai dengan potensi yang ada di desa dan potensi pasar yang tersedia.

Menurut Williment (dalam Prasetyawan, 2015:33) pemahaman masyarakat terhadap pentingnya lembaga pelayanan informasi dapat tercipta dengan baik melalui bentuk inklusifitas yaitu partisipasi langsung kelompok masyarakat dalam pembangunan perpustakaan desa.

Dengan demikian, kegiatan ini dirasa perlu untuk dilakukan dengan tujuan (1) meningkatkan tata kelola perpustakaan nagari, (2) meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan nagari sebagai sumber informasi dalam mewujudkan masyarakat berliterasi, dan (3) mentransformasi layanan perpustakaan nagari berbasis inklusi sosial.

Metode Kegiatan

Untuk mencapai tujuan kegiatan PKM Perberdayaan Perpustakaan Nagari Berbasis Inklusi Sosial di Nagari Tigo Koto Silungkang dan Nagari Lawang Kabupaten Agam akan dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain.

- a. Model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan.
- b. Model *Participatory Tecnology Development* yang memanfaatkan teknologi tepat guna yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan kearifan budaya lokal.
- c. Model *Community development* yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subjek dan objek pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Persuasif yaitu pendekatan yang bersifat himbauan dan dukungan tanpa unsur paksaan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan ini.
- e. Edukatif yaitu pendekatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat.

Metode yang ditawarkan untuk memecahkan masalah adalah dengan melaksanakan pelatihan secara menyeluruh (teori dan praktik) sehingga kemampuan mitra dapat meningkat dalam pengelolaan perpustakaan nagari.

Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Meningkatkan Tata Kelola Perpustakaan Nagari

Pelaksanaan workshop pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan nagari dimulai dengan pembukaan kegiatan yang dihadiri oleh wali nagari perangkat nagari, tokoh masyarakat dan pengelola perpustakaan nagari. Penyajian materi sesuai dengan materi PKM yang sudah dibuat dan penyajian dilakukan dengan metode ceramah dibantu dengan media *power point* dan diskusi kelompok kecil. Tersampainya materi yang sangat dibutuhkan khususnya oleh para pengelola perpustakaan nagari, perangkat nagari dan tokoh masyarakat mengenai pemberdayaan perpustakaan nagari berbasis inklusi sosial. Materi-materi yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola perpustakaan nagari serta sebagai masukan yang berharga bagi perangkat nagari berkaitan dengan peranan perpustakaan nagari dalam menunjang tujuan pendirian perpustakaan nagari sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat nagari atau disebut juga sebagai pembelajaran sepanjang hayat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi peserta workshop terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan konsep pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan nagari. Disamping itu, menanamkan keterampilan pada para peserta workshop dalam mengelola dan memanfaatkan perpustakaan nagari sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat nagari.

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan nagari sebagai berikut. *Pertama*, mulai dengan menyelenggarakan tata kelola perpustakaan nagari sesuai standar dan pedoman yang ditentukan, sehingga perpustakaan nagari yang telah dikelola dengan mengikuti standar acuan dari pemerintah. Tersedianya koleksi yang lengkap dan berkualitas, serta menjangkau pelayanan masyarakat yang luas, dan meningkatnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. *Kedua*, membangun kerjasama kemitraan secara strategis dengan berbagai stakeholder untuk memaksimalkan penyelenggaraan perpustakaan nagari termasuk dalam hal membangun dan memberdayakan masyarakat nagari berbasis literasi.



Gambar 1. Praktik Pengelolaan Perpustakaan Nagari

Target luaran (1) tersedianya bahan baca yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, (2) bahan pustaka siap untuk dimanfaatkan, (3) peningkatan kecepatan pengolahan bahan pustaka, memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan, (4) menghindari kerusakan bahan pustaka, (5) perpustakaan nyaman untuk digunakan dan (6) memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan.

Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Memanfaatkan Perpustakaan Nagari

Membangun dan memberdayakan masyarakat desa berbasis literasi. Masyarakat memiliki kesadaran cukup tinggi dalam hal kebiasaan dan budaya membaca. Masyarakat dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari buku dan dari internet untuk meningkatkan penghasilan mereka. Rencana kerja yang akan dilakukan adalah (1) menumbuhkan hobi atau kegemaran, (2) mengembangkan kebiasaan membaca dan, (3) menciptakan budaya membaca sebagai kebutuhan. Target luaran yang diharapkan (1) tersedianya bahan bacaan yang merangsang minat dan hobi untuk membaca, (2) kebiasaan membaca berkembang menjadi budaya membaca dan (3) meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan nagari untuk memanfaatkan koleksi yang tersedia untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Berbagai sumber bacaan mengandung pengetahuan praktis dan teknis tertentu dapat digali dan diterapkan dengan berdaya guna.

Transformasi Layanan Perpustakaan Nagari Berbasis Inklusi Sosial

Melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu upaya dilakukan dengan mengadakan pelatihan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pekerjaan utama di desa. Rencana kerja yang akan dilakukan adalah (1) perpustakaan nagari melaksanakan pelatihan keterampilan, (2) pelatihan difusi inovasi teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan (3) pendampingan penggunaan sarana dan prasarana produksi. Target luaran yang diharapkan (1) peningkatan keterampilan, (2) peningkatan penggunaan difusi inovasi teknologi dan (4) mampu menggunakan sarana dan prasarana produksi. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan pelatihan pengelolaan perpustakaan nagari sebagai sumber informasi dan pembinaan literasi masyarakat nagari. Target luaran berupa proses adalah terjadinya peningkatan kemampuan khalayak sasaran dalam pemahaman pengertian, konsep, dan proses pengelolaan serta pemanfaatan perpustakaan nagari dan meningkatnya pengetahuan masyarakat.



Gambar. Penyajian Materi oleh Narasumber

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat tercapai bila masyarakat tidak dibangun keberdayaannya. Kemampuan dan keterampilan masyarakat dapat ditingkatkan dengan proses pembelajaran yang diikuti oleh masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah mendukung program ini dan berkepentingan untuk memfasilitasinya melalui transformasi perpustakaan yang ada di lingkungan masyarakat sebagai pusat kegiatan dan pusat belajar masyarakat sepanjang hayat.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat yang telah diselenggarakan di Kabupaten Agam selama empat bulan dari Agustus sampai November 2019 diuraikan sebagai berikut.

1. Sosialisasi kegiatan PKM dilaksanakan di kedua mitra yaitu di Kantor Wali Nagari Lawang dan Kantor Wali Nagari Tigo Koto Palembayan. Pada kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Perpustakaan Nagari Berbasis Inklusi sosial di buka secara resmi oleh walinagari dan dihadiri oleh perangkat nagari (kasi pelayanan, kaur perencanaan, kaur keuangan, dan kaur kesejahteraan), pengelola taman bacaan masyarakat, pengelola perpustakaan nagari, wali jorong, pemuka masyarakat, UKM, kelompok tani, karangtaruna, PKK dan pemuda. Materi-materi yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola perpustakaan nagari serta sebagai masukan yang berharga bagi perangkat nagari berkaitan dengan peranan perpustakaan nagari dalam menunjang tujuan pendirian perpustakaan nagari sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat nagari atau disebut juga sebagai pembelajaran sepanjang hayat.
2. Pelaksanaan workshop pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan nagari dimulai dengan pembukaan kegiatan yang dihadiri oleh wali nagari perangkat nagari, tokoh masyarakat dan pengelola perpustakaan nagari.



Gambar 3. Peserta Workshop Pengelolaan Perpustakaan Nagari

Peserta sangat antusias dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan, sehingga tidak hanya pengalaman secara kognisi dan afeksi saja yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan ini, namun diharapkan mereka juga menerapkannya dalam kegiatan praktis (psikomotorik). Terjalinnnya kerjasama yang erat, diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan terus membina kerjasama di masa yang akan datang. Kegiatan PKM ini mendapatkan respons yang positif, peserta sangat mengharapkan apa yang sudah mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik serta berupaya melakukan berbagai pembenahan, penataan dan pemberdayaan perpustakaan nagari. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan keberadaan perpustakaan nagari semakin nyata di tengah masyarakat.

Simpulan

Simpulan dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah belum semua program prioritas nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui bahkan diterapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu sinergi dan keterlibatan kalangan perguruan tinggi sangat diperlukan agar program tersebut dapat tersosialisasi dan dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, perguruan tinggi khususnya program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dapat menjadi katalisator keberhasilan program pemerintah berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan nagari.

Melalui Program PKM ini, konsep dan strategi pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan nagari berbasis inklusi sosial sudah disampaikan kepada perangkat nagari, pengelola perpustakaan nagari, dan masyarakat. Pengalaman dalam mengembangkan kegiatan pelibatan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan nagari di Kabupaten Agam. Peserta dapat memahami dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi dengan terlebih dahulu menyusun rencana kerja. Masyarakat yang menerima kegiatan penyuluhan juga dapat memahami bahwa perpustakaan nagari tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk meminjam dan membaca buku. Perpustakaan nagari dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat nagari.

Rujukan

Lakmi. "Menumbuhkan Budaya Informasi melalui Lembaga Informasi. Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Perpustakaan". Padang 23 Mei 2015.

Naibaho, Kalarensi. 2007. "Menciptakan Generasi Literat Melalui Perpustakaan". VisiPustaka. Vol. 9 No. 3 Desember 2007.

Prasetyawan, Yanuar Yoga dan Patut Suharso. 2015. "Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perpustakaan Desa". Acarya Pustaka. Vol. 1 No. 1 Juni 2015.

Republika. 2015. "Literasi Masyarakat Indonesia Sangat Rendah", (online) (<http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/12/15/ngm3g840-literasi-indonesia-sangat-rendah>, diakses tanggal 20 Maret 2019).

Sutarno. 2008. Membina Perpustakaan Desa. Jakarta: Sagung Seto.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.